



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS TANJUNGPURA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURHAYATI
2. Jabatan : KETUA PRODI MAGISTER SIPIL
3. NHK : 821650

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.719.253.450**

1. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 361.600.000
2. Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 138.240.000
3. Tanah Seluas 440 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 52.800.000
4. Tanah Seluas 7713 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 16.613.450
5. Tanah Seluas 2813 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 2250 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
7. Tanah Seluas 3600 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
8. Tanah Seluas 1800 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
9. Tanah Seluas 2700 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
10. Tanah Seluas 4500 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
11. Tanah Seluas 8100 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
12. Tanah Seluas 8100 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL



SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

125.950.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI

Rp. 99.000.000

2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

13.450.000

3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

13.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

824.291.482**F. HARTA LAINNYA**

Rp.

Sub Total

Rp.

2.669.494.932**III. HUTANG**

Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.669.494.932

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.